



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 23 Maret 2009

Halaman: 1

KOLOM PAK WALI



Oleh:
Herry Zudiyanto
Wali Kota Yogyakarta



Mengayomi Masyarakat

Hiruk pikuk kampanye terbuka Pemilu 2009 sudah berjalan sepekan. Partai politik (parpol) mulai menebarkan janji untuk menarik simpati masyarakat agar menjadi pemenang dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Seperti halnya kampanye periode yang lalu, rakyat pun kembali disugahi berbagai janji manis dan menarik dari para juru kampanye (jurkam).

Ada yang menawarkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, modal usaha dan sebagainya. Tak ada kampanye dari parpol yang tak menarik. Semua tempat kampanye selalu dipenuhi oleh simpatisan maupun masyarakat yang rupanya juga haus akan janji-janji.

Ditengah hiruk pikuk penyelenggaraan kampanye itu, ada kabar tak sedap yang dilakukan sejumlah oknum pegawai negeri sipil (PNS) dimana mereka terlibat dalam kampanye atau bahkan memfasilitasi parpol kampanye. Padahal jauh hari sebelumnya, selain ada peraturan hukum yang jelas, pemerintah tak henti-hentinya memberikan himbauan. Namun tetap saja ada oknum yang berbuat seperti itu.

Di Yogyakarta, saya selaku kepala daerah menghimbau semua PNS agar mampu menjaga netralitasnya. PNS harus bekerja dan melayani untuk semua masyarakat yang tidak ada diskriminasi dan tidak boleh ada keberpihakan pada satu golongan termasuk ideologi.

Karena PNS di gaji oleh negara yang merupakan representasi rakyat. Untuk itu sudah menjadi kewajiban hukum dan moral bahwa PNS harus juga menjaga netralitasnya dalam menjalankan tugas/wewenang/sarana yang dipunyai dalam Pemilu 2009.

Dan saya yang sebetulnya punya hak politik untuk berkampanye tidak saya gunakan agar saya bisa selaras dengan komitmen bahwa sebagai Wali Kota harus tetap merasa dimiliki oleh semua dan dapat mengayomi semua masyarakat Yogyakarta. Sikap saya merupakan implementasi wakaf politik saya dan partai yang mencalonkan sebagai Wali Kota.

Dengan wakaf politik ini berarti saya sebagai Wali Kota adalah milik masyarakat Yogyakarta. Apa yang saya lakukan dan kebijakan yang dikeluarkan bukan untuk kepentingan parpol tertentu atau parpol yang mencalonkan saya sebagai Wali Kota. Tapi semua yang saya lakukan adalah untuk masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan.

Saya berharap, semua PNS di Yogyakarta dapat memahami hal itu sehingga mampu menjaga netralitasnya hingga Pemilu mendatang. Sekali saya menekankan, tidak boleh ada PNS di Yogyakarta yang melakukan keberpihakan maupun memberikan fasilitas kepada parpol tertentu.

Selain melanggar aturan netralitas, saya yakin keterlibatan PNS akan mencederai proses demokratisasi yang sedang kita bangun sekarang ini.

Meski tidak boleh berpihak bukan berarti saya memberlengku hak politik pribadi para PNS. Saya justru mengingatkan, silakan gunakan hak politik saudara sebaik-baiknya sesuai aspirasi politiknya. Salam HZ.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005